

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Dairi. (2014). Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi. Dairi.

Pemerintah Kabupaten Dairi. (2018). Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi. Dairi.

Pemerintah Kabupaten Dairi. (2020). *PORTAL RESMI PEMKAB DAIRI*. Dipetik April 2022, dari portal.dairikab.go.id

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Jakarta.

Rosmalinda, R. &. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kejaksaan Negeri Sabang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh* , VIII (1), 18.

Sambudi, S. &. (2012). Implementasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Unsrat* , VIII (3), 7.